



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR**

**PENGUNAAN TAPPING BOX UNTUK MENINGKATKAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

**FERNALIZA**

**NIM : 01870624212**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

### LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : FERNALIZA  
NIM : 01870624212  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
SEMESTER : VI (ENAM)  
JUDUL : PENGGUNAAN TAPPING BOX UNTUK  
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 31 Mei 2021

Disetujui oleh :

**PEMBIMBING**



Sahwitri Triandani, SE, M.Si

NIP. 19820806 200604 2 002

**MENGETAHUI**

**DEKAN**



Dr. Drs. H. Muh. Sa'd HM, M.Ag, MM

NIP. 19620512 198903 1 003

**KETUA PRODI**



Sahwitri Triandani, SE, M.Si

NIP. 19820806 200604 2 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak

1. C



## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : FERNALIZA  
 NIM : 01870624212  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VI (ENAM)  
 JUDUL : PENGGUNAAN TAPPING BOX UNTUK  
 MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
 RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA PEKANBARU  
 TANGGAL UJIAN : 21 JUNI 2021

Pekanbaru, Juni 2021

Disetujui oleh :

KETUA PENGUJI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si

NIP. 19820806 200604 2 002

ANGGOTA

PENGUJI I

Irien Violinda Greggriani, SE, M.Si

NIP. 19751106 200710 2 003

PENGUJI II

Ari Nur Wahidah, SE, MM

NIP. 19780105 200710 2 002

1. C
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**PENGUNAAN *TAPPING BOX* UNTUK MENINGKATKAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU**

OLEH :

FERNALIZA  
01870624212

*Tapping Box* adalah alat untuk merekam segala transaksi, registrasi tunai, dan penjualan dari *point of sales* atau *hardware* pada objek pajak. Penggunaan *tapping box* telah menjadi kebijakan baru di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru sebagai salah satu kedisiplinan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya pajak restoran dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan *tapping box* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif . Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *tapping box* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran, hal itu di buktikan dengan adanya peningkatan penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 ke 2019 terjadi hingga 0,3% dengan jumlah Rp. 25.982.846.112. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan *tapping box* sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kota Pekanbaru dalam membayar pajak.

Kata Kunci : ***Tapping Box*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Restoran.**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**APPLICATION OF TAPPING BOX TO IMPROVE RESTAURANT  
TAXPAYER COMPLIANCE AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF  
PEKANBARU CITY**

BY

FERNALIZA  
01870624212

*Tapping Box is a tool for recording all transactions, cash registration, and selling from point of sales or hardware on tax objects. Application of tapping box has become a new policy at the regional revenue agency of pekanbaru city as one of the disciplines to improve taxpayer compliance, one of them is the restaurant tax to increase local revenue (pad). The goals of this final project is to find out application of tapping box to improve restaurant taxpayer compliance at the regional revenue agency of Pekanbaru city. This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques used interview, observation, and documentation techniques. This research was conducted at the Regional Revenue Agency of Pekanbaru city. The results showed that application of tapping box to improve restaurant taxpayer compliance at the regional revenue agency of Pekanbaru city has a positive and significant effect on the level of restaurant taxpayer compliance, it was proven by an increase in restaurant tax revenues from 2018 to 2019 which occurred up to 0,3% with the amount of Rp.25,982,846,112. Conclusion of this research is application of tapping box is very influential at improve restaurant taxpayers compliance at Pekanbaru city in paying taxes.*

**Keywords: Tapping Box, Taxpayer Compliance, Restaurant Tax.**

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahhirabbil'alamin puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan kehendaknya yang telah memberikan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam.

Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“PENGUNAAN TAPPING BOX UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”**. Tugas Akhir ini di tulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A,Md) pada Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kelancaran, kemudahan, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Kedua orang tua penulis yaitu ibunda Eli Darnis dan ayahanda Suardi yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayang serta selalu mendo'akan dan memberi nasihat baik kepada penulis.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Dr. Julina SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Amrul Muzam SHI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sekaligus dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Ibu Irien Violinda, SE. M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada seluruh pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terkhusus Bapak Trio, Bapak Mayu dan Bapak Havis yang telah mengizinkan untuk mengambil data dan telah memberi banyak bantuan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas dukungan yang diberikan kepada penulis, Aamiin.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis,

Fernaliza  
NIM.01870624212

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Metode Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>14</b>
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.....	14
2.2 Visi dan Misi BAPENDA Kota Pekanbaru .....	16
2.3 Uraian Tugas BAPENDA Kota Pekanbaru .....	17
2.4 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru .....	33
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>	<b>34</b>
3.1 Tinjauan Teori .....	34
3.1.1 Pengertian Pajak Secara Umum .....	34
3.1.2 Sistem Pemungutan Pajak .....	36

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.3	Fungsi Pajak .....	37
3.1.4	Jenis Pajak .....	38
3.1.5	Pajak Daerah.....	40
3.1.6	Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	41
3.1.7	Pajak Restoran .....	45
3.1.8	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran.....	46
3.1.9	Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran.....	47
3.1.10	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran.....	47
3.1.11	Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran .....	48
3.1.12	<i>Tapping Box</i> .....	49
3.1.13	Peraturan-Peraturan Mengenai Penggunaan Peralatan Sistem Teknologi Informasi ( <i>Tapping Box</i> ) .....	50
3.1.14	Spesifikasi Perangkat <i>Tapping Box</i> yang Digunakan Dalam Restoran .....	54
3.1.15	Metode Pengambilan Data Transaksi dan Cara Kerja Alat <i>Tapping Box</i> .....	59
3.1.16	Wajib Pajak.....	61
3.1.17	Kepatuhan.....	62
3.1.18	Kepatuhan Wajib Pajak .....	63
3.1.19	Jenis Kepatuhan Wajib Pajak .....	64
3.1.20	Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak .....	65
3.1.21	Pajak Menurut Islam.....	66

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2	Tinjauan Praktek.....	68
3.2.1	Penerapan Penggunaan <i>Tapping Box</i> Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Bapenda Kota Pekanbaru.....	68
3.2.2	Manfaat Penggunaan <i>Tapping Box</i> yang di Peroleh Dari Pihak Bapenda dan Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.....	72
3.2.3	Kendala-kendala yang di Hadapi oleh Bapenda saat Memasang <i>Tapping Box</i> pada Restoran di kota Pekanbaru .....	75
3.2.4	Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Bapenda kota Pekanbaru untuk Mengatasi Kendala Tersebut .....	77
3.2.5	Kelemahan Alat <i>Tapping Box</i> .....	79
3.2.6	Perbandingan Tinjauan Teori dan Praktek .....	80
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
4.1	Kesimpulan.....	83
4.2	Saran .....	84

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1	Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan <i>Tapping Box</i> di Kota Pekanbaru .....	4
Tabel 1.2	Jumlah Restoran di Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan.....	5
Tabel 3.1	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018 dan 2019 .....	70
Tabel 3.2	Perbandingan Tinjauan Teori dan Praktek dalam Penggunaan <i>Tapping Box</i> .....	80



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kas

Gambar 1.1	<i>Tapping Box</i> .....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2021 .....	33
Gambar 3.1	Perangkat Monitoring Transaksi dipasang diantara <i>cash</i> <i>register/point of sales</i> dan printer struk.....	55
Gambar 3.2	Perangkat Monitoring Transaksi dipasang LAN Internal.....	56
Gambar 3.3	Penggunaan <i>online cash register</i> .....	56
Gambar 3.4	<i>Tapping Box</i> .....	58
Gambar 3.5	<i>Printer Data Capture</i> .....	60
Gambar 3.6	<i>Server Data Capture</i> .....	61
Gambar 3.7	Topologi <i>Server Data Capture</i> .....	61

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari sektor pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan adalah wajar bila pemerintah berupaya menggali berbagai potensi pajak sekaligus meningkatkan *tax compliance* (kepatuhan pajak) dari masyarakat sebagai dasar yang kuat untuk mempelancar reformasi perpajakan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2017:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak daerah yang dikelola khususnya pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dimana dalam Pasal 1 ayat (19) disebutkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam rangka pengawasan, walikota atau pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan personil dan atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi disetiap objek pajak restoran.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sangat memiliki andil yang besar dalam menentukan perkembangan besar untuk menopang perekonomian Provinsi Riau. Majunya kota Pekanbaru tidak luput dari berbagai aspek pendukung salah satunya bidang usaha restoran yang termasuk dalam pajak pendapatan daerah.

Pertumbuhan yang pesat dalam perkembangan teknologi beberapa tahun ini, membuat aplikasi sistem informasi berkembang pesat. Aplikasi sistem informasi dan perkembangan teknologi informasi berpengaruh telah masuk dalam kehidupan sosial dan bisnis. Salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia ekonomi dan bisnis yaitu adanya sistem *tapping box* yang terpasang dalam restoran. Sistem *tapping box* merupakan perangkat yang mirip seperti *electronic data capture* (EDC) berbasis akses data dengan mengandalkan smartphone atau komputer dimana proses transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sistem untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pelaporan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut sistem *tapping box* akan membantu pemerintah dalam proses perhitungan dan pemungutan pajak.

Tahun 2019 kota Pekanbaru sudah menerapkan sistem *tapping box* pada restoran yang secara bertahap jumlahnya akan ditingkatkan, pemasangan alat *tapping box* pada tiap restoran yang ada di kota Pekanbaru bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan mempermudah proses perhitungan pajak restoran.

*Tapping Box* adalah sebuah alat yang dapat menangkap transaksi yang tercetak oleh *printer point of sales* yang digunakan oleh wajib pajak. Menurut Hadijah (2020), *tapping box* merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke *printer point of sales* dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan global *system for mobile* (GSM) ke server Badan Pendapatan Daerah. Adapun gambar dari *tapping box* adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1: *Tapping Box*

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2021

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menggunakan *tapping box* sebagai alat yang memproses data transaksi restoran secara *real time*, kemudian menyalurkan tiap transaksi yang terjadi dan tercatat tersebut ke *server* yang terpasang di smartphone atau komputer petugas yang berwenang di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru. Sehingga pihak Badan Pendapatan Daerah akan secara langsung dapat mengetahui transaksi yang ada di restoran tersebut setiap harinya.

*Tapping Box* digunakan pada 4 jenis wajib pajak yaitu Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Berikut penulis sajikan informasi jumlah wajib pajak yang menggunakan *tapping box* di kota Pekanbaru berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.

**Tabel 1.1: Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan *Tapping Box* di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak
1.	Pajak Hiburan	24
2.	Pajak Parkir	26
3.	Pajak Hotel	51
4.	Pajak Restoran	172
<b>Jumlah</b>		<b>273</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah *tapping box* yang sudah di pasang pada empat sektor pajak di kota Pekanbaru sebanyak 273 *tapping box*. 24 perangkat *tapping box* sudah di pasang pada Pajak Hiburan, 26 perangkat *tapping box* pada Pajak Parkir, 51 perangkat *tapping box* pada Pajak Hotel, 172 perangkat *tapping box* pada pajak restoran.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada pajak restoran, karena restoran merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dan berdasarkan data yang dapat bahwa restoran termasuk salah satu pajak daerah yang memiliki



kontribusi paling besar sebesar Rp. 14 Miliar (<https://m.goriau.com>,2021). Di kota Pekanbaru banyak terdapat restoran namun belum semua restoran yang ada di kota Pekanbaru menggunakan *tapping box*. Adapun data mengenai jumlah restoran berdasarkan kecamatan di Pekanbaru sebagai berikut:

**Tabel 1.2 : Jumlah Restoran di Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Restoran	Jumlah Restoran yang tidak menggunakan <i>Tapping Box</i>	Jumlah Restoran yang menggunakan <i>Tapping Box</i>
1.	Rumbai	20	17	3
2.	Rumbai Pesisir	23	23	0
3.	Senapelan	120	100	20
4.	Payung Sekaki	121	105	16
5.	Sukajadi	87	83	4
6.	Pekanbaru Kota	116	100	16
7.	Lima Puluh	100	94	6
8.	Sail	47	40	7
9.	Tenayan Raya	52	50	2
10.	Bukit Raya	91	84	7
11.	Marpoyan Damai	214	165	49
12.	Tampan	197	155	42
<b>Jumlah</b>		<b>1188</b>	<b>1016</b>	<b>172</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah restoran di kota Pekanbaru ada sebanyak 1188 restoran dari 12 kecamatan, 1016 restoran yang tidak menggunakan *tapping box* dan 172 restoran yang menggunakan *tapping box* di kota Pekanbaru.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Trio Fitriagust,SE selaku Subbid Teknologi Informasi dan Analisa Pendapatan Daerah Bapenda Pekanbaru (2021), beliau menyampaikan bahwa tidak ada syarat atau minimal omzet dalam pemasangan *tapping box* terhadap wajib pajak restotan di kota Pekanbaru, selama restoran menjadi wajib pajak di kota Pekanbaru maka akan di pasangkan *tapping*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*box*, tetapi wajib pajak restoran harus sudah *support* dengan *tapping box*. Karena ada keterbatasan alat maka Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru memasang *tapping box* berdasarkan skala prioritas dimana wajib pajak yang memiliki potensi tinggi tetapi pembayarannya kurang.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Mayu Indera Feriadi, SE selaku Bidang Pajak Daerah II (plt) Bapenda Pekanbaru (2021), menyatakan bahwa ada beberapa wajib pajak restoran yang menolak untuk memasang alat *tapping box* dengan alasan tidak mampu membeli mesin kasir dan alat yang tidak *support* dengan perangkat yang ada di wajib pajak restoran, karena pemasangan *tapping box* diharuskan memiliki mesin kasir dan/atau alat yang *support* dengan perangkat.

Wajib pajak juga menolak untuk memasang *tapping box* karena wajib pajak merasa diawasi oleh sistem *tapping box* tersebut. Dalam hal ini, pengusaha restoran yang tidak membayar pajak sesuai dengan yang dibayarkan oleh konsumen adalah wajib pajak yang tidak jujur dan tidak mematuhi hukum. Penerimaan pajak restoran yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian wajib pajak yang membayar pajak restoran.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Pasal 17 ayat (3) dan (4) yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang menolak untuk dipasangkan *taping box* maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, penyegelan tempat usaha, pencabutan sementara izin dan/atau pencabutan tetap izin usaha.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapenda Pekanbaru selama ini kesulitan untuk memperkirakan besaran pajak yang disetor pemilik restoran. Pasalnya, omzet yang didapatkan oleh wajib pajak tidak pasti. Dengan *tapping box* setiap transaksi di restoran dapat terukur, seperti halnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di kota Pekanbaru relatif rendah, hal ini dibuktikan dengan data target dan realisasi wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru yakni pada tahun 2019 sebesar Rp.118,586,072,181 dari jumlah target Rp.117,035,537,059 dengan persentase 101,32%.

Tahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran kota Pekanbaru mengalami penurunan yakni sebesar Rp.80,931,621,224 dari jumlah target sebesar Rp.164,141,248,298 dengan persentase 49,31%. Realisasi penerimaan pajak restoran kota Pekanbaru pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Penyebab tidak tercapainya target pajak restoran kota Pekanbaru ialah masih banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar pajak dan tidak sesuai dengan omzet yang pelaku usaha dapatkan dan beberapa restoran yang menolak untuk memasang *tapping box*, sehingga pajak yang diterima tidak diketahui secara detail besaran pajak yang akan dibayarkan.

Pajak restoran adalah jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dalam peningkatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis tertarik untuk meneliti masalah perpajakan ini yang mana dalam kenyataannya belum berjalan dengan baik di wilayah kota Pekanbaru karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak restoran dan kurang seriusnya petugas memungut, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru. Selain itu juga ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak atau pemilik restoran tentang peraturan perpajakan khususnya pajak restoran.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas dalam penyusunan tugas akhir dengan judul **“PENGGUNAAN *TAPPING BOX* UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan *tapping box* dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja manfaat penggunaan *tapping box* yang diperoleh Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah saat memasang *tapping box* pada restoran di Kota Pekanbaru ?

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penggunaan *tapping box* dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui manfaat penggunaan *tapping box* yang diperoleh Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru saat memasang *tapping box* pada restoran di kota Pekanbaru.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Penulis  
Sebagai tambahan wawasan dan informasi mengenai penggunaan *tapping box* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat bagi Bapenda kota Pekanbaru

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan dapat memberi tambahan informasi kepada pihak-pihak perusahaan.

3. Manfaat bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan wawasan yang dibutuhkan para pembaca atau penelitian selanjutnya.

### Metode Penelitian

#### Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di instansi pemerintah yaitu kantor Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Teratai No.81 Kecamatan Sukajadi, kota Pekanbaru.

#### Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian, penulis melakukan penelitian di kantor Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021.

#### Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari narasumber melalui wawancara. Penulis mewawancarai staf-staf pada seksi pendataan dan penetapan. Adapun data



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer yang diperlukan adalah data pajak restoran yang menggunakan *tapping box* seperti realisasi anggaran pajak restoran dan lainnya.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen, arsip/catatan, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan dan sumber-sumber lainnya.

### 4.4 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Penulis mewawancarai kepala bidang atau pihak-pihak yang bias dijadikan narasumber untuk bias memberikan informasi yang dibutuhkan di kantor Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.

#### 2. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Penulis melakukan observasi terhadap pajak restoran di kantor Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemanfaatan data-data yang diperoleh seperti dokumen, catatan/arsip dari instansi. Penulis mempelajari dokumen, catatan/arsip yang terkait dengan pajak restoran yang diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 14.5 Analisis Data

Adapun analisis data penulis melakukan analisis pada data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis data yang sudah ada dengan teori yang mendukung, kemudian melakukan kesimpulan dan mengemukakan saran.

### Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan uraian jelas mengenai dasar suatu penulisan. Adapun sistematika penulisan tugas akhir secara umum penulis uraikan sebagai berikut :

#### BAB I :

#### PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II :

#### GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan gambaran umum Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru, seperti sejarah singkat berdirinya Badan Pendapatan Daerah, visi dan misi, uraian tugas masing-masing bidang di instansi serta struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III :**

**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini penulis akan menjelaskan teori yang mendukung penulisan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

**BAB IV :**

**PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.

**DAFTAR PUSTAKA**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat DISPENDA) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : Kepala Dinas, Seksi Tata Usaha, Seksi Pajak dan Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak, Seksi Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Pendapatan Lain-lain, Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan.

Sehubungan dengan Keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Daerah kota madya Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Penetapan, Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Penagihan, Unit Penyuluhan.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, pada awal tahun 2017 diganti dengan nama Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

### Visi dan Misi BAPENDA Kota Pekanbaru

#### Visi Instansi

Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”

#### Misi Instansi

1. Mengamankan penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
3. Melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
4. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan dibidang pendapatan.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan daerah.

### Uraian Tugas BAPENDA Kota Pekanbaru

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
- d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
- e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
- f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah.
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kegiatan dan program.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.
- f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan.
- i. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum.
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan.
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan.
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan.
- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai.
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah.

- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
  - q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
  - r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
  - s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan akuntansi badan.
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran.
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
  - m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
  - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Sub Bagian Program  
 Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk organisasi Sub Bagian Program.
  - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
  - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Restra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ.
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengola data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan.

- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ.
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2.
- g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
- h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB, dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah I membawahi :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

#### 7. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian, perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.

- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan dan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pajak Daerah II, membawahi :

- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Walet.
- c. Sub Bidang Pajak Reklame dan Air Tanah.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

### 8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah.
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan, dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah.
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :

- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
- b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan.
- c. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan.

Setiap Sub Bidang Sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisis Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan pemerintah/pemungutan dan penyeteroran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
- c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam meningkatkan PAD.
- d. Penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD.
- f. Pengkoordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :

- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama.
- b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisis Pajak.
- c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

### 10. Unit Pelaksanaan Teknis

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :

- a. UPT kelas A untuk melayani beban kerja yang besar.
- b. UPT kelas B untuk melayani beban kerja yang kecil.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakil pemerintah pusat.

#### 11. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana di maksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UIN SUSKA RIAU



24

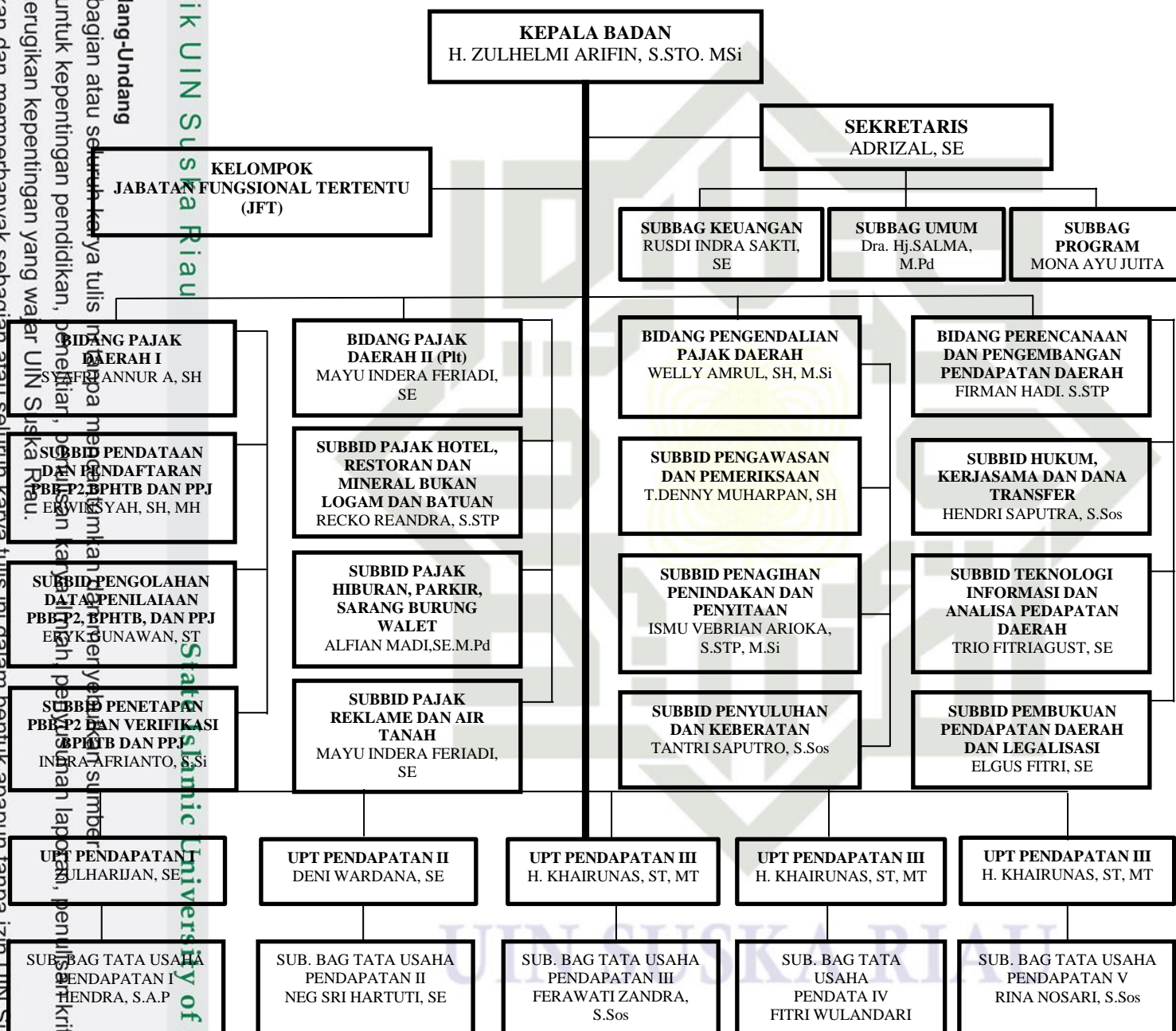
Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

## Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2021

### STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2021



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Penggunaan *tapping box* dalam pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, dengan hal tersebut maka semakin baik penggunaan *tapping box* dalam pajak restoran maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pajak dimana penyusunan laporan keuangan akan memberi informasi yang lebih komprehensif dan relevan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang sesuai dengan cita-cita pemerintahan yang bersih akuntabel dan dapat di percaya.

Kendala dalam memasang alat *tapping box* pada restoran di kota Pekanbaru berupa kendala secara teknis dan non teknis. Kendala secara teknis sebagian besar berasal dari perangkat *tapping box* yang tidak *support* dengan perangkat yang ada pada wajib pajak restoran dan perangkat-perangkat lain yang rusak karena suatu hal sehingga tidak dapat difungsikan. Sedangkan kendala yang bersifat non teknis berasal dari wajib pajak yang enggan untuk memasang *tapping box* dengan alasan wajib pajak merasa diawasi oleh sistem *tapping box*.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru untuk mengatasi kendala yang bersifat teknis yakni dengan melakukan penyesuaian alat



(Devaice). Kendala yang bersifat non teknis yang berasal dari wajib pajak diatasi dengan cara melakukan pendekatan melalui sosialisasi kepada wajib pajak agar mereka memiliki pemahaman mengenai tujuan dan manfaat penggunaan *tapping box*.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini agar kedepannya saran ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan.

Adapun sara dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak restoran agar senantiasa mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena kebijakan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan bersama agar penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga berdampak pada pembangunan daerah yang lebih baik.

Bagi pihak Bapenda agar memberikan sosialisasi yang rutin kepada wajib pajak terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan sehingga wajib pajak mengerti dan mendukung, kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan suatu kebijakan seharusnya dipikirkan dengan matang siapa sasaran dan berapa jumlah anggaran dari kebijakan tersebut agar pelaksanaannya merata dan adil untuk seluruh wajib pajak. Pihak Bapenda juga harus mempertimbangkan sanksi yang tegas atas pelaksanaan suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada.
- Hadijah , 2020. *Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Monitoring Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Hotel DI Badan Pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto*. Jawa Timur: Skripsi
- <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>, diakses pada 20 Maret 2021 pukul 10.30.
- <https://m.goriau.com/berita/baca/realisasi/-pad-bapenda-pekanbaru-di-60-persen-jelang-akhir-triwulan-pertama.html,2021>, diakses pada 6 Maret 2021 pukul 13.45.
- <https://idcloudhost.com/apa-itu-pajak-pengertian-fungsi-manfaat-dan-jenis-jenisnya/amp/#referrer=https://www.google.com&csi=0> diakses pada 21 juni 2021 pukul 15.15.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Materi\_sosialisasi\_tapping\_box\_2019
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
- Pudyatmoko, Sri.Y. 2008. *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahayu, Kurnia, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, Kurnia, Siti. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (edisi 10 buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.

Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sihaan, P.Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.





### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan *tapping box* mulai di terapkan di kota Pekanbaru ?
2. Berapa banyak wajib pajak yang sudah menggunakan *tapping box* dan jenis wajib pajak apa saja yang menggunakan *tapping box* di kota Pekanbaru ?
3. Apakah penggunaan *tapping box* pada wajib pajak di kota Pekanbaru sudah berjalan efektif seperti yang diharapkan ?
4. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemasangan *tapping box* ?  
Jika ada, apa saja kendala tersebut ?
5. Bagaimana upaya Bapenda untuk mengatasi kendala tersebut ?
6. Apa manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak restoran dan Bapenda dengan adanya *tapping box* ini ?
7. Apakah ada syarat-syarat tertentu bagi wajib pajak restoran yang akan dipasangkan *tapping box* ?
8. Apakah ada peningkatan penerimaan pajak setelah menggunakan *tapping box* pada wajib pajak restoran ?
9. Apa saja kelemahan alat *tapping box* ?
10. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah menggunakan *tapping box* ?
11. Bagaimana efektifitas penggunaan *tapping box* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran ?



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1575/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Pekanbaru, 3 Maret 2021

Kepada  
Yth. Sahwitri Triandani, SE, M.Si  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

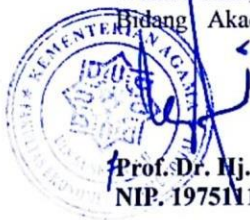
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Fernaliza  
NIM : 1870624212  
Prodi : D3 Administrasi Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :  
**"Penggunaan Tapping Box untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru"**.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,  
Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, SE, M.Si, Ak, CA  
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1630/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 04 Maret 2021 M  
20 Rajab 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Fernaliza  
NIM. : 01870624212  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Penggunaan Tapping Box Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Des. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

**Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/39379**  
**T E N T A N G**



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

**1.04.02.01**

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un 04/F VII/PP.00.9//2021 Tanggal 4 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>FERNALIZA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 01870624212  |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI PERPAJAKAN  |
| 4. Jenjang           | : | DIII   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENGUNAAN TAPPING BOX UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 8 Maret 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Ditampilkan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/794/2021



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/39379 tanggal 8 Maret 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

#### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : FERNALIZA
2. NIM : 01870624212
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI PERPAJAKAN
5. Jenjang : DIII
6. Alamat : JL. KUBANG RAYA GG. HIJRAH KEL. TUAH MADANI KEC. TAMPAN-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PENGGUNAAN TAPPING BOX MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

#### Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.

1. Uraian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760  
PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 700/BPD-SEKR/016

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : **FERNALIZA**  
No. Mahasiswa : 01870624212  
Jurusan : ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN  
SUSKA RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 April 2021

**An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
Sekretaris  
Ub. Subbag. Umum**

**Dra. Hj. SALMA, M.Pd**  
Penata Tk.I

NIP.19640307 200312 2 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BIOGRAFIS PENULIS

Fernaliza, lahir di Pekanbaru, 17 Mei 1998 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Suardi dan Ibu Eli Darnis. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar SDN 040 Pekanbaru pada tahun 2010, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTs-TI Candung, Bukittinggi pada tahun 2014,

Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAS-TI Candung, Bukittinggi dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Jurusan D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT Buana Finance Tbk pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus pada tahun 2020. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan judul:

**PENGUNAAN TAPPING BOX UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”**

UIN SUSKA RIAU